

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
30-07-2022	10 s/d 25-08-2022	25-08-2022	29-08-2022	30-08-2022

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.3, Agustus 2022 (174-183)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro

Badas Sajiwa

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email: badassajiwa0607@gmail.com

M. Syawaluddin

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : syawaluddin@radenfatah.ac.id

Leo Andi Guna

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : leoandiguna77@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the cultural policies of the descendants of Kiyai Marogan in maintaining the cultural values of Kemaro Island as a form of prevention for the Palembang city government who wants to develop the area. This paper also describes the politics of development by the Palembang city government which will be carried out on the island of Kemaro. This study aims to 1. To find out the political form of the descendants of Kiyai Marogan who maintains the cultural values that exist on Kemaro Island. 2. To examine the efforts of Zuriat Kiyai Marogan in preserving the local culture of Kemaro Island.

Research result. This shows that the involvement of zuriat kiyai marogan In maintaining the cultural balance on the island of Kemaro so that there is no marginalization of development carried out by the Palembang city government which

only decides a unilateral policy of coordination with local communities and land owners, then the politics of zuriyat Ki Marogan shows efforts to maintain culture by means of cross-cultural relations with the intention that the existence of one culture must take into account the existence of another. This gives rise to ideas such as fun, tolerance and mutual respect. The results of this study are expected to be a source of information for students, especially the Islamic Politics study program at UIN Raden Fatah Palembang and all students in South Sumatra Province.

Keywords: *cultural politics, kemaro island, cleric.*

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang kebijakan budaya keturunan Kiyai Marogan dalam menjaga nilai-nilai budaya Pulau Kemaro sebagai bentuk pencegahan kepada pemerintah kota Palembang yang ingin membangun kawasan tersebut. Tulisan ini juga menguraikan terkait politik pembangunan oleh pemerintah kota Palembang yang akan dilakukan di pulau kemaro. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Untuk mengetahui bentuk politik keturunan Kiyai Marogan yang mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di Pulau Kemaro. 2. Mengkaji upaya Zuriat Kiyai Marogan dalam memelihara dan melestarikan budaya lokal Pulau Kemaro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan zuriat kiyai marogan Dalam menjaga nilai budaya atau melestarikan kembali nilai-nilai kebudayaan di pulau kemaro supaya tidak terjadinya marjinalisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang yang hanya memutuskan kebijakan sepihak tanpa adanya koordinasi dengan masyarakat setempat dan pemilik tanah, maka orientasi sikap politik dari zuriyat Ki Marogan menunjukkan upaya-upaya dalam mempertahankan kebudayaan dengan Suatu cara yang menekankan hubungan lintas budaya dengan maksud bahwa keberadaan satu budaya harus memperhitungkan keberadaan budaya lain. Hal ini memunculkan ide-ide seperti kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya program studi Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang dan seluruh mahasiswa di Provinsi Sumatera Selatan.

Keywords: *budaya politik, pulo kemaro, kiyai*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya akan budaya yang terdiri dari rangkaian budaya yang ada di seluruh tanah air Indonesia yang berupa budaya lokal. Melihat kenyataannya bahwa Manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan Bersama-sama dalam membentuk kehidupan. Manusia mengumpulkan diri mereka ke dalam unit sosial Budaya menjadi masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial yang menciptakan, menumbuhkan dan mengembangkan budaya (Kistanto, 2017). Artinya tidak ada budaya tanpa manusia, begitupun sebaliknya tanpa manusia budaya tidak akan hidup dan berkembang di masyarakat.

Suatu kebudayaan pada dasarnya memiliki dua aspek, yaitu aspek tujuan, atau perwujudan nilai-nilai yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kebudayaan berarti perwujudan kehidupan dan perilaku manusia. Kebudayaan adalah usaha manusia untuk memahami, menaklukkan, dan menata kembali proses alam yang selalu berubah ini (Duija, 2005)

Namun jika ditelusuri lebih dalam manusia sebagai makhluk sosial dan budaya akan terus hidup berdampingan dengan budaya, dengan adanya kebudayaan yang terus berkembang di kehidupan masyarakat, maka akan terbentuk perilaku atau sikap yang inklusif terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada. Sebagaimana yang dimaksud oleh (Kistanto, 2017) bahwa dalam kebudayaan terdapat perilaku yang dapat diartikan sebagai suatu kesiapan untuk bertindak, yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk menghadapi, merespon atau menilai suatu budaya. Selanjutnya (Hamid, 2020) mengungkapkan bahwa, sebetulnya kajian perilaku sangat berkaitan dengan politik dan budaya, diantaranya memiliki pandangan yang sama-sama berasal dari kajian sosiologi, psikologi dan antropologi yang kemudian diadopsi dan di dialogkan dengan Ilmu Politik. Haryatmoko (2009) mengemukakan bahwa Politik kebudayaan ialah “pengakuan keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar berbagai kelompok yang termarginalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya agar kekhasan identitas mereka diakui”

Peneliti menyimpulkan bahwa politik dan kebudayaan adalah dua aspek yang penting terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan untuk membawa perubahan-perubahan. Baik itu kepada kehidupan sosial maupun kepada ekonomi politik. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, mengkaji tentang Bagaimana bentuk politik kebudayaan Zuriyat Kiyai Marogan dalam mempertahankan Nilai-nilai Budaya di pulau kemaro? Dan upaya apa yang dilakukan zuriyat kiyai marogan dalam mempertahankan nilai budaya yang ada di pulau kemaro.

TINJAUAN LITERATUR

Berdasarkan kajian politik kebudayaan yang diuraikan diatas penulis juga menggali informasi dari buku maupun jurnal dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang

ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah, diantaranya adalah:

Pertama, Rikza Fauzan, dan Nashar dalam jurnal "Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gededi Kota Serang)". Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini membahas tentang perkembangan seni Terebang Gede di Serang, Banten dari tahun 1980 hingga 2008 (studi sejarah nilai budaya lokal). Masalah yang dibahas adalah tentang keberadaan kesenian tradisional di Terebang Gede, Serang. Dari segi sejarah, mulai dari kemunculan kesenian ini, perkembangannya, dinamika dan perubahan yang terjadi, peran seniman dalam melestarikan dan mengembangkannya. Seni Awal dan dampak modernisasi dan globalisasi (Rikza Fauzan, 2017).

Kedua, Andi Chandra Jaya dalam konteks kemelayuan (Strategi Budaya Melayu Dalam Pemecahan Konflik Masyarakat Melayu Palembang Dalam Menghadapi Tantangan Global). Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang. Studi ini menjelaskan tentang bagaimana potensi kebudayaan beroperasi dalam merespons tantangan kehidupan masyarakat Melayu yang memiliki arti penting bagi kajian Islam dan Melayu. Paling tidak ada tiga arti penting yang akan diperoleh dari kajian ini. *Pertama*, Studi ini akan memungkinkan diperolehnya satu peta sustensi dan resitensi budaya atas berbagai tekanan dari luar kebudayaan. *Kedua*, Kajian ini akan menegaskan konstektualisasi budaya sebagai jawaban atas kritik yang menempatkan kebudayaan sebagai faktor statis. *Ketiga*, Studi ini akan memberi peluang bagi revitalisasi dan rekayasa budaya dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan nyata masyarakat Melayu yang dinamis. Keterpaparan dari ketiga hal tersebut sangat besar artinya dalam melihat perkembangan kebudayaan, mengukur modal kekuatan kultural yang dimiliki oleh suatu masyarakat sebagai pelaku budaya.

Ketiga, I.N Duija dalam jurnal yang berjudul "konteks catatan politik kebudayaan (tradisi lisan, naskah dan sejarah)". Studi yang menjelaskan eksistensi manusia dan kebudayaan yang memerlukan strategi pengembangan yang secara khusus masuk pada ranah politik kebudayaan. Dalam fenomena politik kebudayaan ini jika dicermati secara mendalam ada tiga tradisi yang berkembang secara simultan, yakni. *Pertama*, tradisi lokal yang mengusung politik identitas keetnikan berbagai suku bangsa di Indonesia. *Kedua*, tradisi nasional (nilai kearifan budaya nasional) yang tersirat dalam falsafah Pancasila. Dan yang *ketiga*, tradisi global (nilai baru yang bersifat mondial dan transional). Dalam praktik kebudayaan sesungguhnya ketiga tradisi tersebut sulit diberi batas-batas yang pasti meskipun secara teoritis dapat diidentifikasi (Duija I. , 2005).

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sukardi (2004) menjelaskan, dalam penelitian pendekatan kualitatif ini peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, Secara prinsip kebudayaan adalah entitas terakhir yang memungkinkan lahirnya sebuah peradaban manusia. Sebab ia adalah proses, maka dinamika tentangnya sudah pasti dan seharusnya ada. Meminjam istilah Marx seperti yang dikutip oleh M Chairul Basrun Umanailo (Pemikiran-pemikiran Karl Marx) dinamika-lah yang melahirkan sejarah manusia dan kemanusiaan.

Manusia dan kebudayaan dalam hal yang konteks memang tak terpisahkan, secara bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan sosial-budaya, menjadi masyarakat (W Irawan, 2018). Kesadaran manusia terhadap pengalamannya mendorongnya menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan hidupnya yang kemudian disebut kebudayaan, ke dalam konsepsi tentang kebudayaan. Kesadaran demikian bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti hewan atau binatang. Seperti yang disampaikan oleh (Kusumadewi, 2010) bahwa individu adalah sebuah kesatuan unik dimana bercampur kehidupan dan pemikiran, pengalaman dan kesadaran.

Selanjutnya (Syawaludin, 2017) mengemukakan terkait konsep budaya dalam masyarakat sesungguhnya turun menjadi pola tingkah laku yang terikat pada kelompok-kelompok tertentu yang membentuk adat-istiadat. Artinya secara luas bahwa masyarakat adalah individu-individu yang berbuat dan bertindak, harus menjalankan satu hubungan adaptif dengan lingkungannya dalam rangka untuk tetap hidup. Seperti yang dikatakan oleh Mgs. Ahmad Fauzan dalam wawancara sebagai berikut:

“Bagi kami, kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia. Kami tidak mengutamakan satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan yang lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya. Dalam melaksanakan kebudayaan nasional, kami berusaha mencipta dengan sejujur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa di tengah-tengah masyarakat bangsa-bangsa” (Wawancara Mgs. Ahmad Fauzan, Tanggal 17 Juni 2020).

Berbicara tentang politik kebudayaan (Haryatmoko, 2009) mengatakan bahwa arah politik multikultural mengacu pada keberagaman budaya yang menumbuhkan kepedulian agar kelompok yang termarginalisasi dapat terintegrasi, dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budayanya, artinya setiap manusia mesti mempelajari kultur masyarakatnya di antara unsur budaya yang paling signifikan yang harus dipelajari seseorang adalah nilai (values), norma (norms) dan peranan (roles).

Nilai-nilai sebuah kultur mengidentifikasi yang dianggap ideal, tujuan paling tinggi dan standar paling umum untuk memastikan baik dan buruk atau yang disukai dan yang dibenci adalah nilai, norma, dan peranan. Ketiga poin tersebut akan membentuk karakter individu, karena dengan adanya karakter tersebutlah yang akan mengarahkan politik yang baik dan akan membawa perilaku serta tutur kata yang baik, seperti yang di katakan oleh KH Msg Ahmad Fauzan

“sebagai ahli waris dari Ki Marogan, kami bukan hanya mendapatkan warisan harta, akan tetapi Ki Marogan sebagai kiyai karismatik juga mewariskan tentang tata cara bersosialisasi dan bernegosiasi, baik dibidang keagamaan maupun bidang politik, Ki Marogan mengutamakan egaliter dalam penyampaian pesan dan penuntasan masalah, dan ini sudah menjadi kebudayaan yang nilainya akan terus hidup dalam insan. Oleh karena itu, hal-hal inilah yang dapat kami pelajari dan nantinya akan membentuk karakter politik dan memberikan contoh perilaku yang terpuji,”

Artinya politik kebudayaan yang menjadi indikator Zuriat Ki Marogan dalam mempertahankan kebudayaan tersebut karena adanya nilai (values), norma (norms) dan peranan (roles). Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tentunya sebagai pewaris dari Ki Marogan tidak akan lepas dari perilaku yang baik dan tutur kata yang sopan yang menjadikan karakternya berkualitas baik dibidang keagamaan maupun dibidang politik, dalil-dalil Al-Quran maupun Hadits secara tidak langsung juga mengatakan dalam berpolitik maupun berkomunikasi dengan sesama harus bersifat lemah lembut dan tidak angkuh agar terjalannya sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun wujud kekuasaan politik dalam islam adalah sebuah sistem politik yang berlandaskan hukum Allah yang terkandung dalam Al Qur'an, meskipun di dalamnya tidak menyebutkan dengan tegas bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Sebagian besar ayat-ayat politik dalam Al Quran berbentuk nilai-nilai universal dan substansial, sehingga memiliki relevansi dalam berbagai bentuk kehidupan politik baik dalam skala besar maupun kecil, di tingkat tinggi seperti negara maupun dalam level yang lebih rendah seperti dalam kehidupan kepartaian.

Konsep-konsep politik seperti yang disampaikan (Surbakti, 1992) Sejak awal. hingga perkembangan yang terlahir ada sekurang kurangnya lima pandangan mengenai politik. Pertama, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik ialah segala hal yang betkaitan dengan penyelenggaraan negara dan 'pemerintahan. Ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Menurut penelitian badan pusat statistik, yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa (diakses pada tanggal 28 Juni pada laman <https://www.bps.go.id>). Artinya keberagaman yang ada pada masyarakat, bisa saja menjadi tantangan, hal itu disebabkan karena orang yang mempunyai perbedaan pendapat bisa lepas kendali.

Secara hipotetis (Syaifuddin, 2006) semua atau sekurang-kurangnya sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model multikulturalisme

Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas (nationality). Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan anekaragam suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Model ini memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para founders. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasionaletnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing.

Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan.

Model multikulturalisme memiliki premis bahwa masing-masing kebudayaan diakui dan harus menjaga kebudayaannya sendiri, hidup berdampingan secara damai. Hingga kini masih terus diupayakan untuk menemukan model yang pas untuk kondisi Indonesia masa kini dan proyeksi ke masa depan.

Dalam Masyarakat luas, kebudayaan atau multikultural memiliki karakteristik heterogen dengan pola hubungan sosial antar individu yang bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan-perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya.

Dewasa ini para ilinuan politik cenderung mempelajari interaksi antara pemerintah (sebagai lembaga maupun elit dalam pemegang rangka peranan) dan masyarakat (individu maupun kelompok), dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat mengenai kebaikan bersama untuk seluruh masyarakat, seperti yang disampaikan oleh (Surbakti, 1992) yang dipelajari ilmu politik tidak hanya perilaku kelompok, tetapi juga perilaku anggota kelompok. Jadi, yang

dikategorikan politik adalah interaksi individu dan kelompok dengan pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti interaksi merupakan proses yang berkenaan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik ialah kegiatan lembaga-lembaga pemerintah dan para pejabatnya dalam membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan karena pemerintah yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik.

Pembuat dan pengambil keputusan politik akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, dan hubungan kehidupan politik dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Seperti pengamatan peneliti yang terjadi di pulau kemaro, terdapat rancangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang yang sangat mempengaruhi terhadap budaya dan nilai-nilai kebudayaan. hal ini membuat Zuriat Ki Marogan angkat bicara, menurutnya

“masyarakat juga berhak mempengaruhi proses politik. Termasuk dalam kategori yang berupa menentang, mendukung, mengubah, dan mengajukan alternatif lain dari kebijakan umum yang ada. selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan masyarakat, tentunya harus berkoordinasi terlebih dahulu untuk memberikan kebijakan yang mengarah kepada kebaikan bersama” (wawancara dengan KH Msg Ahmad Fauzan).

Dalam menjaga nilai budaya atau melestarikan kembali nilai-nilai kebudayaan maka orientasi sikap politik dari zuriat Ki Marogan menunjukkan upaya-upaya dalam mempertahankan kebudayaan yang ada seperti yang dikatakan oleh Dedek Chaniago

“ketika orang dalam suatu kelompok etnis dan budaya menyadari cara hidup dan adat-istiadat warisan leluhur sedang terancam punah oleh masuknya gelombang budaya asing dan kelompok etnis luar, banyak pihak dari etnis yang terancam itu bersikap dan berprilaku nativism, upaya keras dan menyeluruh untuk melestarikan, bahkan menghidupkan kembali, budaya leluhur dan tradisi mapan bertambah kuat persepsi terhadap ancaman itu, bertambah kuat aspirasi untuk ethnic revivalism ini.”(wawancara bersama Dedek Chaniago Selaku jubi dari Zuriat Ki Marogan, Tanggal 15 Juni 2022).

Artinya dalam kehidupan bermasyarakat, zuriat memiliki urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama, terkandung nilai moral yang lebih tinggi dari pada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu. Selain itu, dalam kelompok masyarakat harus memahami teori-teori multikultural yang lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya.

Kebesaran kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa terletak pada kemampuannya untuk menampung berbagai perbedaan dan keberagaman dalam satu ikatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. manfaat keberagaman

budaya suku-suku bangsa adalah sarana untuk menengahi setiap ada isu konflik separatis dan disintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang berkaitan dengan Bentuk Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro dan Upaya-Upaya Zuriat Kiyai Marogan Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Pulau Kemaro. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Politik Kebudayaan Zuriat Kiyai Marogan Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Budaya Di Pulau Kemaro adalah politik kebudayaan yang menjadi indikator Zuriat Ki Marogan dalam mempertahankan kebudayaan tersebut karena adanya nilai (values), norma (norms) dan peranan (roles). Hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Tentunya sebagai pewaris dari Ki Marogan tidak akan lepas dari perilaku yang baik dan tutur kata yang sopan yang menjadikan karakternya berkualitas baik dibidang keagamaan maupun dibidang politik, dalil-dalil Al-Quran maupun Hadits secara tidak langsung juga mengatakan dalam berpolitik maupun berkomunikasi dengan sesama harus bersifat lemah lembut dan tidak angkuh agar terjalannya sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Upaya-Upaya Zuriat Kiyai Marogan Dalam Melestarikan Budaya Lokal Di Pulau Kemaro antara lain, , pertama dalam kelompok masyarakat harus memahami teori-teori multikultural yang lebih menekankan relasi antar-kebudayaan yang nantinya akan menimbulkan sebuah gagasan mengenai kesetaraan, toleransi, saling menghargai, untuk mengatur. Kedua, dalam Pembuat dan pengambil keputusan politik akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat, dan hubungan kehidupan politik dengan perubahan sosial ekonomi -dan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, zuriyat kiyai marogan selalu melibatkan dan mengedepankan masyarakat dalam berbagai kepentingan terutama yang berhubungan dengan memperthankan estitensi nilai-nilai kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M., & Syawaludin, M. (2021). Politik Identitas: Peran Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 107-117
- Duija, I. (2005). konteks Catatan Politik Kebudayaan (Tradisi Lisan, Naskah dan Sejarah). *Jurnal Wacana*, 123.
- Duija, I. N. (2005). Tradisi Lisan, naskah dan sejarah: Sebuah Catatan politik kebudayaan. *Wacana*, 112.
- Hamid, I. (2020). *PERILAKU POLITIK, Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truth*. Mataram: Sanabil.
- Haryatmoko. (2009). Menakar Politik Kebudayaan. *Kompas*, 6.
- Kistanto, N. H. (2017). Tentang Konsep Kebudayaan. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8.
- Kusumadewi, L. R. (2010). Sosiologi Memaknai Kembali Multikulturalisme. *Sosiologi*, 68.
- Lubis, N. A. (2006). MULTIKULTURALISME DALAM POLITIK:Sebuah Pengantar Diskusi. *Antropologi Sosial Budaya*, 22.
- Mikail, K. (2020). Problem Doktrin Keagamaan Dan Fundamentalisme Dalam Membangun Budaya Multikultural. *Journal of Darussalam Islamic Studies*, 1(1), 12-19.
- Rikza Fauzan, M. d. (2017). Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang) . *Jurnal Candrasangkala*, 67.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Syaifuddin, A. F. (2006). MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA. *Antropologi Sosial Budaya* , 8.
- Syawaludin, D. M. (2017). *Teori Sosial Budaya dan Methodenstreit*. Palembang: NoerFikri (CV AMANAH).